

ABSTRAK

Periode 2007 hingga 2010 merupakan masa penting bagi perkembangan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) di berbagai negara di dunia. Pada periode ini perkembangan HAM di negara-negara dunia telah menunjukkan kemajuan, termasuk pada negara-negara berkembang. Keberhasilan ini ternyata tidak lepas dari dukungan rezim HAM internasional, khususnya organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Salah satu negara yang menjadi obyek dukungan dan partisipasi penegakan HAM PBB adalah Myanmar. Sejak dekade 1980-an negara ini dianggap oleh masyarakat internasional sangat rentan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dijalankan oleh rezim junta militer untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus kekuasaannya di Myanmar.

Pada tahun 2008 PBB mulai menjalankan misinya di Libya. Kebijakan ini dijalankan oleh PBB melalui beberapa bentuk, yaitu kebijakan normatif dan perundang-undangan, finansial dan politik. Sampai dengan tahun 2010 kebijakan PBB ini telah memberikan hasil yang positif bagi penegakan HAM di Myanmar, meskipun belum dapat menyelesaikan masalah ini secara mendasar. Dinamika inilah yang akan diuraikan secara mendalam pada karya penelitian ini.